

## KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PENERAPAN SISTEM E-KINERJA

Dayang Sekar Ayu Safitri

NPP. 29.0920

*Asdaf Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: 29.0920@praja.ipdn.ac.id

### ABSTRACT

**Problem Statement/Background:** One of the efforts to improve the performance of the State Civil Apparatus is bureaucratic reform. E-Kinerja is an example of a bureaucratic reform policy that has been implemented to local governments. With the aim of continuing and controlling the quality of bureaucratic reform, an electronic system is applied to public policy. The performance of the Bondowoso Regency Community and Village Empowerment Service in implementing the system is the key discussion in this research. The program is supported by Government Regulation Number 30 of 2019 concerning Performance Assessment of Civil Servants, namely regulations regarding the implementation of the e-performance system. **Purpose:** The purpose of this research is to analyze, describe obstacles, and describe efforts to overcome them. **Method:** Using qualitative methods with an inductive approach, data collection using observation, interviews, and documentation techniques for later data analysis. Through the six indicators of Mahsun's theory as a measure of success, three indicators were found to be considered not good, namely input, process, and output indicators. **Result:** The performance of the service did not run smoothly because there were several obstacles that hindered its performance. **Conclusion:** The conclusion from the analysis of this research is that the performance of the Bondowoso Regency Community and Village Empowerment Service in implementing the e-performance system is considered less than optimal and still needs to be improved. **Keywords:** Performance, Implementation, E-Kinerja System

### ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Salah satu upaya dalam mewujudkan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara adalah reformasi birokrasi. E-kinerja adalah contoh kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan hingga ke pemerintahan daerah. Dengan tujuan melanjutkan dan menertibkan kualitas reformasi birokrasi, diterapkan sistem elektronik pada kebijakan publik. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan sistem tersebut menjadi kunci pembahasan dalam penelitian ini. Program tersebut didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yaitu peraturan mengenai penerapan

sistem e-kinerja. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, menguraikan hambatan, dan menjelaskan upaya untuk mengatasi. **Metode:** Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian analisis data. Melalui enam indikator teori Mahsun sebagai alat ukur keberhasilan di mana ditemukan tiga indikator dinilai belum baik yaitu indikator masukan, proses, dan keluaran. **Hasil/Temuan:** Kinerja dinas tidak berjalan mulus karena terdapat beberapa kendala yang menghambat kerjanya. **Kesimpulan:** Kesimpulan hasil analisis penelitian ini yaitu kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan sistem e-kinerja dinilai kurang optimal dan masih harus diperbaiki. **Kata kunci:** Kinerja, Penerapan, Sistem E-Kinerja

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berbagai perubahan telah terjadi pada pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah merupakan satu dari berbagai faktor yang mempercepat proses pembangunan daerah. Selain itu, kecanggihan perkembangan teknologi komunikasi dalam era desentralisasi tersebut juga mempercepat perubahan. Ditambah dengan zaman dan teknologi yang semakin berkembang membuat perubahan yang semakin signifikan dalam pemerintahan.

Salah satu upaya dalam mewujudkan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara adalah reformasi birokrasi. E-kinerja adalah contoh kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan hingga ke pemerintahan daerah. Dengan tujuan melanjutkan dan menertibkan kualitas reformasi birokrasi, diterapkan sistem elektronik pada kebijakan publik. Kemudahan mengakses informasi dan registrasi administrasi merupakan tujuan utama penetapan kebijakan tersebut. Diharapkan pula dengan penerapannya, praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkurang dalam tubuh pemerintahan. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sistem yang memadai, sebagai pemenuhan tuntutan masyarakat yaitu wujud pemerintahan yang baik. Sinergi yang kuat diantara pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat perlu dijaga untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan. Dalam membina Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja yang dipusatkan pada sistem prestasi kerja, penilaian prestasi kerja perlu diadakan kepada PNS karena hal tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tersebut dilakukan oleh pejabat penilai pada suatu proses penilaian yang sistematis, di mana pejabat penilai tersebut adalah pimpinan langsung dari PNS bersangkutan terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja PNS. Pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) sebelum menggunakan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. DP3 dinilai tidak relevansi lagi penerapannya terhadap berkembangnya situasi serta kondisi serta kebutuhan hukum dalam membina PNS. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Aparatur yang sigap dalam melayani masyarakat tidak mampu diwujudkan lewat 8 (delapan) unsur penilaian DP3 sebagai model penilaian prestasi kerja PNS. SKP dinilai lebih memiliki kompetensi dalam menilai kinerja para PNS dan menjadi dasar penggantian regulasi. Dasar hukum utama dalam penilaian kinerja PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Dapat disimpulkan bahwa pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 belum mampu memaksimalkan kinerja seorang PNS. Karena dalam penerapannya, SKP bukan dijadikan dasar pengambilan kebijakan pembinaan pegawai. SKP hanya dijadikan prasyarat kenaikan pangkat beserta urusan pelayanan kepegawaian saja. SKP dalam pemberlakuannya tidak disertai dengan sanksi ataupun penghargaan yang sesuai, sehingga dirasa tidak adil bagi pegawai yang tentu memiliki kinerja yang berbeda-beda. Hal itulah kemudian yang menjadikan peraturan tersebut diganti dengan peraturan baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yaitu peraturan mengenai penerapan sistem e-kinerja. Substansi Penilaian Kinerja PNS tersebut terdiri dari pembobotan Nilai SKP dan Perilaku Kerja PNS, tata cara penilaian, Penilaian Perilaku Kerja dan Penilaian Kinerja PNS, Sistem Informasi Kinerja, Pejabat penilai dan Tim Penilai Kinerja PNS, dan Tindak Lanjut Penilaian yang berupa pelaporan kinerja, pemingkatan kinerja, penghargaan kinerja, dan sanksi serta keberatan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan sistem e-kinerja tidak selalu mulus. Terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja dinas tersebut.

Faktor manusia seperti kurangnya tenaga kerja, kurangnya pelatihan dan keterampilan, dan sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Dari wawancara dan observasi penulis, ditemukan bahwa beberapa oknum lulusan SLTA/SMK cenderung tidak bisa segera beradaptasi dengan pekerjaan dan tidak langsung mempelajari apa yang menjadi tugasnya. Itulah yang disebut sebagai sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Hal ini mempengaruhi kinerja dinas karena pada dasarnya kinerja pegawai sangat berpengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Secara umum, faktor manajemen yang buruk juga mempengaruhi kualitas kinerja sebuah organisasi, seperti kesalahan mengidentifikasi kebutuhan, perencanaan yang kurang matang, dan pengambilan keputusan tidak berdasarkan fakta dan data. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso yang tidak segera bertindak tanggap dalam mengatasi masalah yang dihadapi, serta tidak bergerak cepat dalam pengambilan keputusan menjadi kendala yang menghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan sistem e-kinerja.

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem e-kinerja di organisasi pemerintahan baik secara teknis yaitu kemampuan sumber daya manusia, maupun dari segi sarana dan prasarana, pelaksana kebijakan publik tetap merupakan salah satu tugas dari PNS, maka seharusnya segala kendala itu tidak menghambat pelaksanaan penerapan sistem ini. Upaya dalam pelaksanaannya harus lebih besar dari kendala yang ada.

Permasalahan dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso adalah kinerja organisasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kinerja yang baik nantinya akan menjadikan hasil yang baik karena kinerja dan hasil akan berbanding lurus. Hasil kinerja ini

dapat dilihat dari aspek waktu kerja, kerja sama, kuantitas, dan kualitas yang dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan tersebut sangat diperlukan kinerja aparatur yang baik dan profesional pada pemerintah instansi terkait khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan sistem e-kinerja.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penulisan-penulisan sebelumnya merupakan bahan perbandingan dan acuan dalam menyusun penulisan ini. Penulisan yang dilaksanakan Muhammad Sahar (2015) yang berjudul Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar di mana dalam penulisan tersebut yang dipantau adalah kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan. Selanjutnya penulisan Prof. Dr. Warsito Utomo (2005) yang berjudul Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di mana di dalamnya dibahas mengenai kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara spesifik. Ketiga, Fadhlán Husni (2019) yang memiliki judul Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penulisan ini dilakukan untuk mengkaji akuntabilitas publik, pengendalian intern pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan fungsional yang memilikipengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Palembang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan fungsional, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Keempat, penulisan yang ditulis oleh Nur Atika Istiqomah (2018) berjudul Pengembangan E-Government Menuju Pelayanan Publik Berbasis Digital di Pemerintah Kota Magelang. Tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi pengembangan e-government dan untuk mengetahui aspek pendukung dan penghambat pengembangan e-government menuju pelayanan publik berbasis digital di Pemerintah Kota Magelang.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Pertama, penulisan Muhammad Sahar (2015) berjudul Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. Metode penulisan yang menggunakan kualitatif deskriptif sama dengan metode yang akan digunakan dalam penulisan penulis. Disebutkan pula wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Perbedaannya terletak pada objek penulisan dan program yang dilaksanakan. Dalam penulisan yang tersebut dipantau kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan, di mana dalam penulisan yang penulis susun objeknya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan sistem e-kinerja.

Kedua, dalam penulisan berjudul Kinerja Dinas Pemberdayaan oleh Prof. Dr. Warsito Utomo memiliki persamaan dengan penulisan penulis yaitu objek penulisan yang juga merupakan Dinas Pemberdayaan. Selain itu metode penulisan yang digunakan pun sama yaitu metode penulisan kualitatif dengan analisis deskriptif, diterapkan melalui wawancara observasi dan daftar pertanyaan. Perbedaannya adalah, jika dalam penulisan penulis mengkaji lebih spesifik mengenai program yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulisan ini hanya mengkaji lebih dalam mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan.

Ketiga, penulisan oleh Fadhlán Husni tersebut memiliki relevansi dengan penulisan yang penulis susun. Karena dalam penulisan penulis terdapat pula rumusan masalah yang membahas faktor-faktor

atau kendala yang mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam penulisan sebelumnya, objek penulisan diambil secara garis besar yaitu pemerintah daerah. Jenis penulisannya pun berbeda. Jika pada penulisan penulis menggunakan jenis penulisan deskriptif, penulisan sebelumnya menggunakan jenis penulisan asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:55), penulisan asosiatif adalah penulisan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penulisan ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Keempat, penulisan dengan judul Pengembangan E-Government Menuju Pelayanan Publik Berbasis Digital di Pemerintah Kota Magelang. Dengan berbagai persamaan antara penulisan penulis dan penulisan ini, ditemukan perbedaan. Diantaranya objek penulisan di mana objek dalam penulisan ini adalah Pemerintah Kota Magelang. Sistem yang dikembangkan adalah e-government. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem e-kinerja, malah keduanya memiliki keterkaitan, e-kinerja merupakan produk turunan dari e-government yang sama-sama bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemeritahan dengan sistem digital.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan sistem e-kinerja. Serta mengetahui upaya yang dilakukan dinas tersebut dalam mengatasi kendala-kendala yang menghambat kinerja dinas dalam menerapkan sistem e-kinerja.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan biasanya bersifat kualitatif. Pendekatan penulisan ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam penulisan status suatu objek, kelompok manusia, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa, suatu set kondisi yang terjadi pada masa kini. Penulisan deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan berbagai fenomena yang diteliti. Penulisan ini berarti fokus pada gambaran data yang didapat melalui wawancara serta observasi. Oleh karena itu, dalam laporan penulisan, data yang dikemukakan dan dianalisis adalah data dalam bentuk hasil dari proses wawancara dan observasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso menjadi obyek yang dibahas dalam penelitian ini. Menggunakan teori kinerja oleh Mahsun dalam buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik (2013).

Dalam teori Mahsun ini terdapat enam dimensi, diantaranya dimensi masukan (input) dengan indikator berupa sarana fisik, organisasi dan manajemen, serta kompetensi sumber daya manusia. Dimensi proses dengan indikatornya yaitu uraian dari dimensi proses tersebut berupa keberlangsungan kinerja organisasi serta upaya yang dilakukan organisasi tersebut untuk mengatasi

kendala dalam organisasi. Dimensi keluaran (output) dengan indikator berupa peningkatan kerja organisasi, perbaikan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan program, dan pengawasan kinerja pegawai. Dimensi hasil (outcomes) dengan indikator berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kualitas kerja organisasi itu sendiri. Dimensi manfaat dengan indikator berupa fungsi dari kinerja organisasi tersebut untuk mengukur pencapaian organisasi dan adanya patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Terakhir dimensi dampak dengan indikator kinerja organisasi yang baik dalam perwujudan program sehingga nantinya sistem e-kinerja dapat dirasakan dampak dan pengaruhnya pada kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.

Terdapat sembilan orang informan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso yang mendukung kelengkapan informasi untuk penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya satu orang Kepala Dinas; Sekretaris Dinas; Sub Koordinator Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa; Sub Koordinator Administrasi dan Aset Desa; Sub Koordinator Pemerintahan Desa; serta tiga Staf sebagai Operator E-Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dilanjutkan dengan analisis data dengan teknik analisis data induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Teknik tersebut diawali dengan pemilihan data (reduksi data), kemudian penyajian data, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

### **3.1. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam Penerapan Sistem E-Kinerja**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak disosialisasikannya sistem e-kinerja tahun 2015, didukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seluruh OPD di Indonesia menerapkan aplikasi sistem e-kinerja untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan, dan beban unit/satuan kerja organisasi. Selain itu sistem e-kinerja digunakan dalam pengelolaan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Kinerja suatu birokrasi publik merupakan suatu isu yang sangat aktual yang terjadi pada masa sekarang ini. Masyarakat masih memandang kinerja dari birokrasi publik pada saat ini belum bisa memberikan rasa kepuasan yang tinggi, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Hal tersebut disebabkan masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Di sisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program-program disuatu instansi pemerintah.

Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat

diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

Menurut Keban (2014:192) Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil.

Untuk dapat mempelajari kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan untuk menilai kinerja tersebut. Sehingga indikator atau ukuran kinerja itu tentunya harus dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan, karena itu berbeda antar satu dengan yang lainnya. Hal ini juga yang merupakan fungsi dari diterapkannya sistem e- kinerja yang juga diterapkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Kajian tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dengan peran yang diembannya memiliki nilai yang strategis, sehingga informasi tentang kinerja organisasi ini menjadi penting untuk diketahui. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi, maka diperlukan indikator baik pada tataran ini indikator menggambarkan tingkat pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai.

Penilaian kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan.

### **3.2. Kendala yang Menjadi Faktor Penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam Menerapkan Sistem E-Kinerja**

Penelitian yang penulis lakukan menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan sistem e-kinerja. Kendala yang terjadi dalam kinerja dinas tersebut dapat dikatakan terletak pada manajemen yaitu kinerja dinas dalam mensosialisasikan sistem e-kinerja, koordinasi yaitu kinerja dinas dalam melakukan koordinasi Bersama BKD Kabupaten Bondowoso, serta jaringan internet.

### **3.3. Upaya yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam Mengatasi Kendala yang Menghambat Kinerja Dinas tersebut dalam Menerapkan Sistem E-Kinerja**

Berbagai kendala yang menghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian bagi dinas tersebut untuk diupayakan penyelesaiannya. Berikut adalah upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan para informan.

Pertama dengan melakukan sosialisasi ulang mengenai penerapan sistem e-kinerja. Tanpa adanya sosialisasi segala sesuatu yang terjadi tidak akan ada pedoman, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan

tidak mencapai goals yang ingin dicapai. Sosialisasi ulang ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso untuk memaksimalkan penyampaian informasi dan petunjuk teknis kepada para pegawai.

Kedua dengan melakukan koordinasi Bersama BKD Kabupaten Bondowoso dalam membentuk SOP penerapan sistem e-kinerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso yang ada di lingkup Kabupaten Bondowoso tentunya sering berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, terkhusus untuk masalah SOP tentang sistem e-kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso melakukan komunikasi dengan pihak BKD Kabupaten Bondowoso.

Hal ini dilakukan guna membantu BKD Kabupaten Bondowoso dalam menyusun SOP tentang sistem e-kinerja agar dapat tersusun dengan baik dan sesuai dengan keadaan yang ada. BKD Kabupaten Bondowoso merupakan OPD yang memiliki kewenangan dalam perumusan SOP tentang sistem e-kinerja karena kaitannya dengan kepegawaian dan penilaian kinerja PNS maka BKD Kabupaten Bondowoso memiliki kewenangan dalam menyusun SOP tentang sistem e-kinerja ini

Ketiga dengan melakukan koordinasi dengan pihak ketiga untuk penguatan jaringan internet. Koordinasi pihak ketiga ini berwujud koordinasi yang dilakukan oleh pihak ketiga di mana di dalamnya hal ini perusahaan penyedia jasa penguatan jaringan internet yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso. Koordinasi pihak ketiga ini nantinya berwujud kesepakatan kontrak, pelaksanaan kontrak ini merupakan tahapan penting yang dilakukan dalam proses penguatan jaringan internet ini. Karena hasil dari baik atau buruknya proses penguatan jaringan internet bergantung pada keberhasilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam melakukan kontrak dengan penyedia jasa penguatan jaringan internet.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Perbedaan antara penulisan ini dengan penulisan-penulisan sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut. Pertama, penulisan Muhammad Sahar (2015) berjudul Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. Metode penulisan yang menggunakan kualitatif deskriptif sama dengan metode yang akan digunakan dalam penulisan penulis. Disebutkan pula wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Perbedaannya terletak pada objek penulisan dan program yang dilaksanakan. Dalam penulisan yang tersebut dipantau kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan, di mana dalam penulisan yang penulis susun objeknya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan sistem e-kinerja.

Kedua, dalam penulisan berjudul Kinerja Dinas Pemberdayaan oleh Prof. Dr. Warsito Utomo memiliki persamaan dengan penulisan penulis yaitu objek penulisan yang juga merupakan Dinas Pemberdayaan. Selain itu metode penulisan yang digunakan pun sama yaitu metode penulisan kualitatif dengan analisis deskriptif, diterapkan melalui wawancara observasi dan daftar pertanyaan. Perbedaannya adalah, jika dalam penulisan penulis mengkaji lebih spesifik mengenai program yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulisan ini hanya mengkaji lebih dalam mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan.

Ketiga, penulisan oleh Fadhlun Husni tersebut memiliki relevansi dengan penulisan yang penulis susun. Karena dalam penulisan penulis terdapat pula rumusan masalah yang membahas faktor-faktor

atau kendala yang mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam penulisan sebelumnya, objek penulisan diambil secara garis besar yaitu pemerintah daerah. Jenis penulisannya pun berbeda. Jika pada penulisan penulis menggunakan jenis penulisan deskriptif, penulisan sebelumnya menggunakan jenis penulisan asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:55), penulisan asosiatif adalah penulisan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penulisan ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Keempat, penulisan dengan judul Pengembangan E-Government Menuju Pelayanan Publik Berbasis Digital di Pemerintah Kota Magelang. Dengan berbagai persamaan antara penulisan penulis dan penulisan ini, ditemukan perbedaan. Diantaranya objek penulisan di mana objek dalam penulisan ini adalah Pemerintah Kota Magelang. Sistem yang dikembangkan adalah e-government. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem e-kinerja, malah keduanya memiliki keterkaitan, e-kinerja merupakan produk turunan dari e-government yang sama-sama bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemeritahan dengan sistem digital.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis dari berbagai indikator yang dibahas pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

Menurut analisis penulis secara keseluruhan, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dinilai belum baik, perlu dilakukan perbaikan secara optimal di beberapa indikator. Dilihat dari enam indikator dari teori yang digunakan, terdapat tiga indikator yang kurang yaitu indikator masukan (input), indikator proses (process), dan indikator keluaran (output).

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso menurut Teori Mahsun sebagaimana terjadi di lapangan dinilai belum maksimal, diukur dari kualitas kinerja organisasi dan masih adanya beberapa kendala yang menghambat kinerja dinas tersebut dalam menerapkan sistem e-kinerja.

Faktor penghambat dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan sistem e-kinerja adalah sosialisasi sistem e-kinerja yang tidak maksimal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem e-kinerja yang terstruktur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, serta jaringan internet yang kurang stabil dan tidak segera ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.

Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam mengatasi kendala yang menghambat kinerja dinas tersebut dalam menerapkan sistem e-kinerja adalah dengan melakukan sosialisasi ulang tentang sistem e-kinerja kepada PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, melakukan komunikasi, berkoordinasi, dan memberi masukan kepada pihak BKD Kabupaten Bondowoso terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait penguatan jaringan internet.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan selama dua minggu dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dan penyusunan penelitian dilakukan dalam waktu satu bulan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengetahui penelitian saat ini disusun berdasarkan keadaan saat ini dan diharapkan ada penelitian lanjutan agar bisa diketahui perkembangan kinerja dinas dalam menerapkan sistem e-kinerja mengingat sistem ini adalah program nasional dan belum maksimal dalam pelaksanaannya.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Keban, Yeremias, T, 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi. Publik, Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Gava Media.
- Mohammad, Mahsun. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Husni Fadhlán. 2019. “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang.  
<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4077>
- Istiqomah, Nur Atika. 2018. “Pengembangan E-Government Menuju Pelayanan Publik Berbasis Digital di Pemerintah Kota Magelang”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tidar.  
[http://repositori.untidar.ac.id/repositori/index.php?p=show\\_detail&id=8108](http://repositori.untidar.ac.id/repositori/index.php?p=show_detail&id=8108)
- Sahar, Muhammad. 2015. “Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.  
<https://fdokumen.com/document/skripsi-kinerja-dinas-sosial-dalam-pelaksanaan-program-pembinaan-anak-jalanan.html>
- Utomo, Warsito. 2005. “Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Universitas Gajah Mada.  
[http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penulisan\\_detail&sub=PenulisanDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=28122](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penulisan_detail&sub=PenulisanDetail&act=view&typ=html&buku_id=28122)